

**Pengaruh Sumber Daya Manusia (SDM) dan Regulasi terhadap Penatausahaan
Barang Milik Daerah (BMD) di Kota Banda Aceh**

Meutia Handayani¹, Devi Mulia Sari², Lukman Hakim³

Program Studi Akuntansi Politeknik Aceh,

Jl. Tanggul, Pango Raya-Ulee Kareng, Banda Aceh, Telp : 0852-6067-2378

Email: meutiahandayani@politeknikaceh.ac.id¹), devimuliasari@politeknikaceh.ac.id²),
lukmanhakim@gmail.com³)

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Sumber Daya Manusia (SDM) dan Regulasi Terhadap Penatausahaan Barang Milik Daerah di Kota Banda Aceh pada BPKK Kota Banda Aceh. Data yang digunakan melalui pendekatan kuantitatif. Analisis deskriptif merupakan gambaran terhadap kecenderungan responden dalam menjawab intensitas item-item pernyataan dalam kuesioner. Analisis deskriptif terhadap variabel dalam penelitian ini yaitu: Sumber Daya Manusia (X1) dan Regulasi (X2) terhadap Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) (Y). Skala interval yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *ordinal*. Hasil penelitian menjelaskan Sumber Daya Manusia (X1) berpengaruh positif terhadap penatausahaan BMD pada BPKK (Y). Hal ini dibuktikan dari hasil uji t masa kerja yang bernilai lebih besar dari nilai t tabel ($t_{hitung} - 0,500 < t_{tabel} 2,02269$) serta nilai signifikansi X_1 Sig > dari 0,05 ($0,618 > 0,05$). Regulasi berpengaruh positif terhadap penatausahaan BMD pada BPKK (Y). Hal ini dibuktikan dari hasil uji t SDM yang bernilai lebih besar dari nilai t tabel ($t_{hitung} 10,364 > t_{tabel} 1,664$) serta nilai signifikansi X_1 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Hal ini menunjukkan diterimanya H_{a2} dan ditolaknya H_{o2} . SDM (X1) dan regulasi (X2) menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh secara simultan terhadap variabel penatausahaan BMD pada BPKK (Y). hal ini karena digambarkan dengan diterimanya H_{a3} di tolaknya H_{o3} , serta nilai signifikan F sebesar 0,000 karena nilai F sig < dari 0,05 = 0,000 > 0,05 sehingga Hasil ini mendukung hipotesis ketiga (H_3).

Kata kunci : *Pengaruh SDM, Regulasi, penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD)*

I. PENDAHULUAN

Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah yang mensyaratkan bentuk dan isi dari laporan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan

oleh peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan. Berdasarkan Undang- Undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip- prinsip akuntansi yang ditetapkan

dalam menyusun dan menyajikan penatausahaan barang milik daerah Pemerintah, selanjutnya dibuat dalam Peraturan Walikota Banda Aceh (PERWAL) nomor 12 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, pengelolaan BMD adalah tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani BMD, dengan meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola BMD. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan barang milik daerah mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; peraturan yang berlaku terlebih pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Namun fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh masih berkebutuhan dengan permasalahan BMD

Dalam rangka mengelola barang milik daerah agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan pengamanan sehingga memberi nilai aset bagi daerah. Pengamanan adalah kegiatan/tindakan pengendalian dan penertiban dalam upaya pengurusan barang milik daerah secara fisik, administratif dan tindakan hukum agar barang-barang milik daerah dapat dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambilalihan atau klaim dari pihak lain (Ketaren : 2014).

Hasil berbeda ditemukan dalam beberapa penelitian, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Septarini dan Papilaya (2016) dan Anggraeni dan Riduan (2014) menunjukkan bahwa sistem pengendalian *intern* tidak berpengaruh terhadap kualitas penatausahaan barang milik daerah pemerintah daerah.

Teori *steward ship* menjelaskan kecenderungan *steward* untuk melaksanakan fungsi - fungsi pemerintahan sesuai keinginan prinsipil dinilai masih terjadi pada manajemen pemerintahan daerah. Hal ini dibuktikan dalam tujuan pemerintahan daerah sebagai salah satu aset daerah untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya yang nantinya akan diberikan sebagian kepada pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Faktor yang mempengaruhi kualitas penatausahaan barang milik daerah merupakan unsur penting dalam penatausahaan barang milik daerah Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh sebagai dasar pengambilan keputusan

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas penatausahaan Barang Milik Daerah .
2. Apakah regulasi berpengaruh terhadap kualitas penatausahaan Barang Milik Daerah.
3. Apakah SDM dan regulasi berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap penatausahaan barang milik daerah.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap penatausahaan barang milik daerah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah regulasi pengaruh terhadap penatausahaan barang milik daerah.
3. Untuk mengetahui apakah SDM dan regulasi berpengaruh secara simultan

(bersama-sama) terhadap penatausahaan barang milik daerah.

II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pengertian Pengelolaan Aset

Pengelolaan aset sangat sangat berguna dalam setiap instansi maupun kelembagaan hal ini akan bermanfaat dalam pengambil keputusan dimasa yang akan datang. Manajemen aset dilingkungan pemerintah dikenal dengan istilah manajemen Barang Milik Daerah (BMD). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/ daerah, aset atau barang milik negara/daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan belanja negara/daerah. Aset adalah barang atau benda yang bergerak dan juga tidak bergerak, baik yang berwujud (tangible) maupun yang tidak berwujud (intangible), dimana keseluruhan hal tersebut mencakup aset atau harta aset dari suatu organisasi, instansi, badan usaha, atau pun perorangan (Hidayat, 2011:4). Sedangkan menurut PSAK No.16 yang direvisi pada tahun 2011, aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan, baik berwujud maupun tidak berwujud yang berharga atau bernilai yang akan mendatangkan manfaat bagi seseorang atau perusahaan tersebut. Memang aset itu bukan dilihat dari bentuknya tapi dari manfaatnya atau nilainya, sehingga semua kekayaan yang dimiliki asal memiliki manfaat bisa disebut aset. Baik yang memiliki wujud secara nyata atau pun tidak tetap bisa disebut aset asalkan mendatangkan manfaat bagi pemiliknya

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Aset

Manajemen adalah alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan,

manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengertian manajemen itu sendiri adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Hasibuan : 2017).

Faktor-factoryang mempengaruhi keberhasilan implementasi Sigolabang barang milik daerah menurut (Rosihan : 2017) adalah :

1. Kualitas Aparatur
Sumber daya manusia khususnya aparatur merupakan pilar utama dalam lingkungan organisasi yang akan mempengaruhi terwujud atau tidaknya tujuan organisasi. Kalau organisasi pemerintah dalam operasionalnya, sumber daya aparatur merupakan komponen penting dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan terhadap publik. Bahwa kemampuan serta kualitas aparatur sangat berpengaruh terhadap pengelolaan aset.
2. Sistem informasi
Pengelolaan aset secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat pengambilan keputusan. Bahwa sistem informasi merupakan salah satu faktor penting dalam pengelolaan aset.
3. Komitmen Pimpinan
Komitmen pimpinan merupakan salah satu faktor yang kuat dalam manajemen asset, dimana semakin kuat komitmen Pimpinan maka sistem pengelolaan aset akan semakin baik.

Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia merupakan Kualitas Sumber Daya Manusia merupakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan dan moral yang tinggi (Pasolong:2015).

Kompetensi merupakan kualifikasi yang diperlukan dalam melakukan audit atau pemeriksaan terhadap barang material yang memiliki keahlian dan pelatihan yang cukup dan memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai (Pulungan: 2019).

Pengertian kualitas sumber daya manusia, yaitu Sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif, tetapi juga nilai kompetitif, generatif dan inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti intelligence, creativity, dan imagination, tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar seperti bahan mentah, lahan, air, energi otot, dan sebagainya (Ndraha: 2012).

Kompetensi aparatur merupakan pilar penyangga penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penerapan akuntansi yang efektif. Kemampuan sumber daya manusia meningkatkan efektivitas praktik akuntansi, dan pada gilirannya berpengaruh pada integrasi informasi akuntansi, pembentukan pelaporan yang berguna, diseminasi laporan keuangan yang efektif, dan informasi akuntansi yang dapat dipercaya (Sari: 2013).

Berdasarkan pengertian di atas bahwa kualitas sumber daya manusia itu merupakan kemampuan individu yang terampil melaksanakan suatu pekerjaan dan mampu bersaing dan berinovasi dalam menciptakan suasana pekerjaan yang mendukung tugas pokok dalam organisasi.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kualitas Sumber Daya Manusia

Kompetensi bukan merupakan kemampuan yang dimiliki dalam melaksanakan suatu pekerjaan secara profesional. (Wibowo: 2016) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecakapan kompetensi seseorang, yaitu :

1. Keyakinan dan nilai-nilai
 Keyakinan dan nilai-nilai keyakinan setiap orang harus berpikir positif baik tentang dirinya maupun terhadap orang lain dan menunjukkan ciri orang yang berpikir ke depan.
2. Keterampilan
 Keterampilan memainkan peran di kebanyakan kompetensi. Berbicara di depan umum merupakan keterampilan yang dapat dipelajari, dipraktikkan, dan diperbaiki
3. Pengalaman
 Keahlian dari banyak kompetensi memerlukan pengalaman mengorganisasi orang, komunikasi dihadapan kelompok, menyelesaikan masalah, dan sebagainya
4. Karakteristik kepribadian
 Kepribadian termasuk dalam penyelesaian konflik, menunjukkan kepedulian interpersonal, kemampuan bekerja dalam tim, memberikan pengaruh dan membangun hubungan.
5. Motivasi
 Motivasi memberikan dorongan, apresiasi terhadap pekerjaan bawahan, memberikan pengakuan dan perhatian individual dari atasan dapat mempunyai pengaruh positif terhadap motivasi seorang bawahan.
6. Isu emosional
 Hambatan emosional dapat membatasi penguasaan kompetensi. Takut membuat kesalahan, menjadi malu, merasa tidak disukai atau tidak menjadi bagian, semua cenderung tidak membatasi motivasi dan inisiatif.
7. Kemampuan Intelektual

Kompetensi tergantung pada pemikiran kognitif seperti pemikiran konseptual dan pemikiran analitis, faktor seperti pengalaman dapat meningkatkan kecakapan dalam kompetensi ini

8. Budaya organisasi

Budaya organisasi mempengaruhi kompetensi sumber daya manusia dalam kegiatan sebagai berikut :

- a) Praktik rekrutmen dan seleksi karyawan mempertimbangkan siapa diantara pekerja yang dimasukkan dalam organisasi dan tingkat keahlian tentang kompetensi.
- b) Sistem penghargaan mengkomunikasikan pada pekerja bagaimana organisasi mengharai kompetensi.
- c) Praktik pengambilan keputusan mempengaruhi kompetensi dalam memberdayakan orang lain, inisiatif, dan memotivasi orang lain.
- d) Filosofi organisasi isi, visi dan nilai-nilai berhubungan dengan semua kompetensi.
- e) Kebiasaan dan prosedur memberi informasi kepada pekerja tentang berapa banyak kompetensi yang diharapkan.
- f) Komitmen pada pelatihan dan pengembangan mengkomunikasikan tentang pembangunan berkelanjutan.
- g) Proses organisasional yang mengembangkan pemimpin secara langsung mempengaruhi kompetensi kepemimpinan.

Pengertian Penerapan Sistem Informasi

Sistem Informasi adalah kumpulan dari sub-sub sistem yang saling terintegrasi dan berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah tertentu dengan

cara mengolah data dengan alat yang namanya komputer sehingga memiliki nilai tambah dan bermanfaat bagi pengguna (Taufiq : 2013). Sistem informasi adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan, yang bekerja untuk mengumpulkan dan menyimpan data serta mengolahnya menjadi informasi untuk digunakan (Hartono: 2013). Sistem informasi merupakan suatu komponen yang terdiri dari manusia, teknologi informasi, dan prosedur kerja yang memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk mencapai suatu tujuan (Mulyanto : 2009).

Manfaat Penerapan Sistem Informasi

Penerapan sistem informasi manajemen mempunyai keunggulan, yaitu dapat menolong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkenalkan inovasi dalam bisnis, dan membangun sumber-sumber informasi strategis. Tujuan penerapan sistem informasi akuntansi menurut (Krismiaji: 2015) yaitu :

1. Menjamin bahwa informasi yang dihasilkan dapat dipercaya, aktivitas bisnis dilaksanakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan manajemen serta sejalan dengan peraturan yang telah digariskan.
2. Melindungi dan menjaga aktiva organisasi termasuk data lain yang dimiliki oleh perusahaan.
3. Indikator Penerapan Sistem Informasi

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka. Kerangka berpikir merupakan kajian teoritis dan kajian empiris yang dirumuskan secara logis. Kajian teoritis merupakan teori pendukung dan kajian empiris merupakan hasil penelitian

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hipotesis penelitian dibentuk dari interaksi antara kajian teoritis dan kajian empiris. Hipotesis merupakan proposisi yang dimaksudkan untuk diuji dan dihubungkan dengan pengujian empiris. Hasil uji hipotesis selanjutnya diinterpretasikan dalam pembahasan yang menghasilkan kesimpulan dan saran.

Teknik Pengumpulan Data

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif karena penelitian ini dapat disajikan dalam bentuk nomor angka. Berdasarkan sugiono (2017 : 14) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan menjadi metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara acak, pengumpulan data memakai instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditetapkan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan metode penelitian kausal komperatif. Menurut Paramita dan Rizal (2019) bahwa penelitian kausal komparatif merupakan penyelidikan realitas yang sistematis dimana ilmuan tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung karena eksistensi berasal dari variabel bebas sudah terjadi. Atau karena variabel tersebut pada dasarnya tidak dapat dimanipulasi. Menurut Paramita dan Rizal (2019 : 14) Penelitian Kausal Komparatif adalah penelitian yang mencari tahu tentang hubungan sebab – dampak. Metode penelitian ini sangat erat kaitannya dengan penelitian hubungan.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data Jenis dan Sumber Data

Terdapat 2 cara untuk memperoleh sumber data berdasarkan sumbernya yaitu sebagai berikut :

1. Sumber Primer

Menurut Sugiyomo (2017 : 193) yang dimaksud data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Data yang diperoleh dari data primer ini akan diolah. Jenis data primer ini ditemukan jawaban dari pihak- pihak yang berkompeten dalam penatausahaan barang milik daerah.

2. Sumber Skunder

Menurut Sugiyono (2018 :456) yang dimaksud dengan sumber skunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan Undang-Undang ketenagakerjaan, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai sistem penatausahaan barang milik daerah.

Teknik. Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis digunakan oleh peneliti yang bertujuan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini. Pada penelitian ini peneliti memilih jenis penelitian kuantitatif yang harus membutuhkan data yang jelas dan spesifik. Menurut Sugiono (2017, 194) cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interviu (wawancara),

kuisisioner (angket), *observasi* (pengamatan) dan gabungan ketiganya.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. pada teknik pengumpulan data berupa wawancara adalah akan dilaksanakan oleh peneliti

(a. **Dependent Variable : Y_BMD** BPKK Kota Banda Aceh. Hasil wawancara akan dilakukan peninjauan langsung pada lapangan dan kemudian akan diolah yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Kuisisioner adalah berupa suatu pertanyaan atau pernyataan yang sifatnya tertutup atau terbuka. Dana dapat diberikan langsung kepada responden ataupun dikirimkan melalui pos atau internet. Teknik pengumpulan data dalam membagikan kuisisioner untuk mendapatkan responden staf guna mengetahui apakah variabel independen yang digunakan berpengaruh terhadap variabel dependennya. Penelitian dengan metode membagikan kuisisioner adalah suatu teknik yang bertujuan untuk mengumpulkan data, pengumpulan data ini adalah dengan cara berinteraksi langsung antara peneliti dengan responden pada kantor BPKK Banda Aceh. Teknik pengumpulan data dengan kuisisioner ini mempunyai teknik *skala Likert*,

HASIL DAN PEMAHASAN

Analisis regresi linier berganda dapat dilakukan dengan minimal 2 variabel independen. Dalam penelitian ini diperoleh dua variabel independen yaitu

variabel Sumber Daya Manusia dan Regulasi.

Tabel 1
Analisis Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		
	B	Std. Error	
1	(Constant)	4,321	1,475
	X1_masakerja	-,060	,120
	X2_kompetensi	,876	,085

a. Dependent Variable: Y_lapkeu

Sumber : *edit penulis 2023*

Berdasarkan Tabel 1 hasil analisis regresi linier berganda tersebut diperoleh nilai koefisien variabel SDM (X1) sebesar -0,060 dan nilai variabel Regulasi (X2) sebesar 0,085. Maka dari itu persamaan regresi yang dapat diperoleh yaitu sebagai berikut:

$$Y = 4,321 - 0,060X1 + 0,876X2 + e$$

Dimana:

Y = Penatausahaan BMD pada BPKK

X1 = SDM

X2 = Regulasi

e = Standar error

Persamaan regresi linier berganda di atas dapat diketahui bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar 4,321 menunjukkan bahwa apabila nilai variabel SDM dan regulasi sama dengan 0 maka nilai variabel Penatausahaan BMD pada BPKK sebesar 4,321.
2. Koefisien regresi variabel SDM bernilai negatif sebesar 0,060. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% SDM (X1) maka Penatausahaan BMD pada BPKK (Y) akan menurun sebesar 0,60. Begitu juga sebaliknya. Jadi SDM (X1) berpengaruh negatif terhadap Penatausahaan BMD pada BPKK (Y). Hasil ini lebih diperjelas oleh

kuesioner yang dijawab oleh responden yang menyatakan tidak setuju akan semakin tingginya sumber daya manusia maka akan semakin meningkat kualitas penatausahaan BMD melalui aplikasi BPKK di SKPD Kota Banda Aceh.

3. Koefisien regresi variabel Kompetensi SDM bernilai positif sebesar 0,876. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% regulasi (X2) maka Penatausahaan BMD pada BPKK (Y) akan meningkat sebesar 0,876. Begitu juga sebaliknya apabila terjadi regulasi (X2) menurun sebesar 1% maka akan menurunkan Penatausahaan BMD pada BPKK (Y) sebesar 0,876. Jadi regulasi (X2) berpengaruh terhadap Penatausahaan BMD pada BPKK (Y). Hasil ini lebih diperjelas oleh kuesioner yang dijawab oleh responden yang menyatakan setuju akan adanya Sumber Daya Manusia yang baik akan menjadikan penatausahaan BMD pada BPKK lebih baik.

2) Uji t (Parsial)

Uji-t dilakukan untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia dan regulasi terhadap Penatausahaan BMD pada BPKK Pemerintah Kota Banda Aceh dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau H_0 ditolak dan H_a diterima dengan nilai. Maka secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau H_0 diterima dan H_a ditolak dengan nilai. Maka secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah pengaruh SDM (X1) dan regulasi (X2) terhadap Penatausahaan BMD pada BPKK (Y) akan diuji dengan menggunakan uji t, hasil pengujian sebagaimana terlihat pada Tabel 2

Tabel 2 Hasil Uji t (Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	4,321	1,475		2,929	,004
	X1_masakerja	-,060	,120	-,047	-,500	,618
	X2_kompetensi	,876	,085	,966	10,364	,000

a. Dependent Variable: Y_lapkeu

Sumber: Pengolahan Peneliti

Pengaruh SDM (X1) dan Regulasi (X2) terhadap Penatausahaan BMD pada BPKK Pemerintah Kota Banda Aceh (Y)

Berdasarkan Tabel 4.13 Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa diketahui nilai t_{hitung} untuk variabel SDM (X1) sebesar -0,500 sedangkan nilai t_{tabel} dengan taraf nyata (a) sebesar 0,05 (5%) serta $df = n-k-1$ ($36-2-1$) = 33 adalah sebesar 1,664. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak karena nilai $t_{hitung} -0,500 < t_{tabel} 2,929$. Hasil uji hipotesis individual untuk variabel SDM (X1) menunjukkan bahwa variabel SDM (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Penatausahaan BMD pada BPKK Kota Banda Aceh (Y). Hal ini dilihat dengan ditolaknya H_a dan diterimanya H_0 serta nilai signifikansi X1 sebesar $0,618$. karena nilai $T sig >$ dari $0,05 = 0,618 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa SDM (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Penatausahaan BMD pada BPKK Kota Banda Aceh (Y).

Hasil ini tidak mendukung hipotesis pertama (H_{a1}), karena nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau tingkat signifikan yang dimiliki oleh variabel SDM $> 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa SDM tidak berpengaruh secara parsial terhadap Penatausahaan BMD pada BPKK Kota Banda Aceh.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eriva (2012) dan Idha Purwaningrum (2017) dengan hasil penelitian yaitu variabel SDM tidak berpengaruh terhadap penatausahaan BMD.

Pengaruh Regulasi (X2) secara Parsial Terhadap Penatausahaan BMD pada BPKK Kota Banda Aceh (Y)

Berdasarkan Tabel 4.13 Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa diketahui nilai t_{hitung} untuk variabel Regulasi (X2) sebesar 10,364 sedangkan nilai t_{tabel} dengan taraf nyata (a) sebesar 0,05 (5%) serta $df = n - k - 1$ ($36 - 2 - 1$) = 33 adalah sebesar 1,664. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima karena nilai t_{hitung} $10,364 > t_{tabel}$ 1,664. Dari hasil uji hipotesis individual untuk variabel Regulasi (X2) menunjukkan bahwa variabel berpengaruh terhadap variabel Penatausahaan BMD pada BPKK (Y). Hal ini dilihat dengan diterimanya H_{a2} dan ditolaknya H_{o2} serta nilai signifikansi X1 sebesar 0,000 karena nilai $T sig <$ dari $0,05 = 0,000 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel regulasi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penatausahaan BMD pada BPKK (Y).

Hasil ini mendukung hipotesis kedua (H_{a2}), karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau tingkat signifikan yang dimiliki oleh variabel regulasi $< 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa regulasi berpengaruh secara parsial terhadap penatausahaan BMD pada BPKK Kota Banda Aceh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan Permatasari (2021) yang menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap penatausahaan BMD. karena dengan adanya Regulasi maka peranan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan organisasi akan berjalan dengan baik serta kegiatan dapat diselesaikan secara profesional, efektif dan efisien.

3) Uji F (Simultan)

Uji Simultan digunakan untuk melihat pengaruh SDM dan regulasi terhadap penatausahaan BMD pada BPKK Pemerintah Kota Banda Aceh,

hasil uji F ditunjukkan pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3 Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9395,574	2	4697,787	232,926	,000 ^b
	Residual	1593,316	79	20,169		
	Total	10988,890	81			

a. Dependent Variable: LapkeuSIPKD

b. Predictors: (Constant), Kompetensi, Masakerja

Sumber: Pengolahan Peneliti

Hasil uji hipotesis simultan pada Tabel 3 diketahui F_{hitung} sebesar 232.926. sedangkan nilai F_{tabel} dengan taraf (a) sebesar 0,05 (5%) serta $df = n - k$ ($36 - 2$) = 34 adalah sebesar 3,11. Maka dapat disimpulkan bahwa h_0 ditolak dan h_a diterima karena nilai F_{hitung} $232,926 > F_{tabel}$ 3,11. Dari hasil uji hipotesis simultan untuk variabel SDM (X1) dan regulasi (X2) menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh secara simultan terhadap variabel Penatausahaan BMD pada BPKK (Y). hal ini karena digambarkan dengan diterimanya H_{a3} di ditolaknya H_{o3} , serta nilai signifikan F sebesar 0,000 karena nilai $F sig >$ dari $0,05 = 0,000 < 0,05$ sehingga Hasil ini mendukung hipotesis ketiga (H_{a3}), karena tingkat signifikan yang dimiliki oleh variabel penatausahaan BMD pada BPKK $< 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa SDM (X1) dan regulasi (X2) berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap penatausahaan BMD pada BPKK (Y).

4) Koefisien Determinasi (R2)

Uji ini bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentasi total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas. Apabila analisis yang digunakan adalah regresi sederhana, maka yang digunakan adalah nilai R Square. Namun, apabila analisis yang digunakan adalah regresi berganda, maka yang digunakan adalah nilai Adjusted R Square. R Square dapat dilihat pada Tabel 4. sebagai berikut:

Tabel 4. Koefisien Determinasi R²

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,925 ^a	,855	,852	4,47152

a. Predictors: (Constant), X2_kompetensi, X1_masakerja

b. Dependent Variable: Y_lapkeu

Sumber: Pengolahan peneliti

Berdasarkan Tabel 4.15 diperoleh nilai R Square 0,855 atau 85.5%. Hasil ini berarti sebesar 85.5% variabel SDM (X1) dan Regulasi (X2) berpengaruh terhadap penatausahaan BMD pada BPKK, sedangkan sisanya sebesar 14,5% dipengaruhi oleh faktor lain atau variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pengaruh SDM Terhadap penatausahaan BMD pada BPKK

Sumber Daya Manusia (X1) secara parsial berpengaruh positif terhadap penatausahaan BMD pada BPKK (Y). Hal ini dibuktikan dari hasil uji t SDM yang bernilai lebih besar dari nilai t tabel ($t_{hitung} -0,500 < t_{tabel} 2,02269$) serta nilai signifikansi X_1 Sig > dari 0,05 ($0,618 > 0,05$).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eriva (2012) dan Idha Purwaningrum (2017) dengan hasil penelitian yaitu variabel SDM tidak berpengaruh terhadap penatausahaan BMD. penelitian yang dilakukan oleh Muzahid (2014), yang menyatakan bahwa SDM berpengaruh signifikan terhadap penatausahaan BMD daerah. Regulasi merupakan kemampuan yang dimiliki seorang pegawai yang berhubungan dengan pengetahuana, ketrampilan, dan sikap dalam menyelesaikan kinerjanya sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien dan efektif

Pengaruh Regulasi terhadap penatausahaan BMD di BPKK

Regulasi berpengaruh positif terhadap penatausahaan BMD pada BPKK (Y). Hal ini dibuktikan dari hasil uji t SDM yang bernilai lebih besar dari nilai t tabel ($t_{hitung} 10,364 > t_{tabel} 1,664$) serta nilai signifikansi X_1 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Hal ini menunjukkan diterimanya H_{a2} dan ditolak nya H_{o2} .

Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik Regulasi maka semakin baik pula penatausahaan BMD pada BPKK Kota Banda Aceh.

Pengaruh SDM dan Regulasi Terhadap Penatausahaan BMD pada BPKK Kota Banda Aceh

SDM (X1) dan regulasi (X2) menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh secara simultan terhadap variabel penatausahaan BMD pada BPKK (Y). hal ini karena digambarkan dengan diterimanya H_{a3} di tolaknya H_{o3} , serta nilai signifikan F sebesar 0,000 karena nilai F sig < dari 0,05 = $0,000 > 0,05$ sehingga Hasil ini mendukung hipotesis ketiga (H_3).

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wungalow (2017) yang menyatakan bahwa SDM dan regulasi berpengaruh terhadap Penatausahaan BMD BPKK .

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada Bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh hasil atas pengaruh SDM dan regulasi terhadap penatausahaan BMD pada BPKK Kota Banda Aceh. Responden dalam penelitian ini sebanyak 36 responden yang terdiri dari Kabid Aset, 3 orang Kasi dan Staf BPKK Kota Banda Aceh. Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah dilakukan menggunakan bantuan aplikasi *Statistical Package For Social*

Science (SPSS) 24, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. SDM secara parsial berpengaruh terhadap penatausahaan BMD pada BPKK Kota Banda Aceh.
2. Regulasi secara parsial berpengaruh terhadap penatausahaan BMD pada BPKK Kota Banda Aceh.
3. SDM dan Regulasi secara simultan berpengaruh terhadap penatausahaan BMD pada BPKK Kota Banda Aceh.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Hartono, Bambang. 2013. *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugraha, M. E. 2012. *Pengaruh Independensi, Kompetensi, Dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi. Vol. 1, No. 4. Juli 2012: 56-59
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Pulungan, Riva Ubar Harahap; Khairul Anwar. 2019. *Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Profesionalisme Terhadap Salah Saji Material Pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Medan*.
- Peraturan Walikota Banda Aceh nomor 12 tahun 2019 tentang *Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah*
- Sari, Eka Nurmala. 2013. *Pengaruh Budaya Organisasi Dan Kompetensi Aparatur Daerah Terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik Serta Dampaknya Terhadap Good Governance*.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Mulyanto. (2015). *Pengaruh Perencanaan Karier, Penilaian Prestasi, Pemberian Tunjangan Kinerja dan Komitmen Pimpinan Terhadap Prestasi Kerja* (Studi pada Kantor Pengadilan Negeri di Wilayah EX – Karesidenan Kedu). Jurnal Bisnis & Ekonomi,
- Narimawati, Umi. 2008. *“Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, Teori Dan Aplikasi.”* Bandung: Agung Media 9.
- Sartika, Amwiarni. 2015. *Pengaruh Kompetensi, Disiplin Kerja Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palu.* E-Jurnal Katalogis 3 (1): 54–65.
- Taufiq, Rohmat. 2013. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Usman,
- Wibowo. 2016. *Manajemen Kinerja Kelima*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.